BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :132.B/KPTS/ V/2017

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terpilihnya secara demokratis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 10(sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang* Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor: 140/127/2017 tanggal 25 April 2017, Perihal Pengusulan Nama – Nama Calon Anggota BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 132.B/KPTS/V/2017
TANGGAL : 30 Mei TAHUN 2017
TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	KAHATOLA	1. MUHDAR SALASA	1. SUSILO BUNGA	KETUA
		2. BADRUN TJINA	2. SAFRI PUASA	WAKIL KETUA
		3. NURHANI SALASA	3. NURHANI SALASA	SEKRETARIS
		4. FATAHUN SEHE	4. ATNI SEHE	KETUA BIDANG
		5. NURDIN BUKA	5. FATAHUN SEHE	KETUA BIDANG
2.	BOSALA	1. FESTUS MORI	1. FESTUS MORI	KETUA
		2. ADELINA SIDIKI	2. YUNINGSI BATALI	WAKIL KETUA
		3. KISON PALI	3. ALDINCE KUNDIMAN	SEKRETARIS
		4. MARKUS KODA	4. FELIANUS MADESO	KETUA BIDANG
		5. TOMAS PALI	5. MARKUS KODA	KETUA BIDANG
3.	BAKUN PANTAI	1. FENI TAKAWALUDE	1. ALEXI LOTONO	KETUA
		2. APOLOS TALIAWO	2. JON MOHIBU	WAKIL KETUA
		3. YOKNI TJINA	3. YUSUP MORAKA	SEKRETARIS
		4. ROYANI NIKANOR	4. ANDRI K. WANE	KETUA BIDANG
		5. JON MOHIBU	5. ARIS DJOLE	KETUA BIDANG
4.	TOSOMOLO	1. YEHESKIEL PUNANA	1. DJON MOHIBU	KETUA
		2. YON MOHIBU	2. YEHESKIEL PUNANA	WAKIL KETUA
		3. YORDAN SEBE	3. ENGGELINA SAMALAGI	SEKRETARIS
		4. LABAN PUNANA	4. YULWEN MOHIBU	KETUA BIDANG
		5. ALEXANDER PUNANA	5. ELVIN TONI	KETUA BIDANG
5.	BARATAKU	1. OBET TALIAWO	1. RONAL TUANDALI	KETUA
		2. ICE MAHADUN	6. APSON HASANG	WAKIL KETUA
		3. FONI MASANAE	7. YULINDA TEHENE	SEKRETARIS
		4. ABSON HASANG	8. OBET Y. TALIAWO	KETUA BIDANG
		5. DOMINIKA MANGGARAI	9. FONI MASANAE	KETUA BIDANG
6.	GAMKAHE	1. YONATAN SIOM	1. NAHOR MATERO	KETUA
		2. MIHEL DAGILAHA	2. HERBANUS SILILING	WAKIL KETUA
		3. MANASE TOTARI	3. STEVI SERO	SEKRETARIS
		4. HERBANUS SILILING	4. MELSAN BATUI	KETUA BIDANG
		5. HERMANUS SERO	5. JEMI SAKALATI	KETUA BIDANG
7.	PUMADADA	1. AYUB DADERE	1. AYUB DADERE	KETUA
		2. ABRAHAM UANG	2. RIBMAR TAKAWALUDE	WAKIL KETUA
		3. HENGKI J. PUREN	3. POTIFAR KUNDIMAN	SEKRETARIS
		4. RAPIAH SANTOSA	4. HENGKI J. PUREN	KETUA BIDANG
		5. FENNI N. GAHIWU	5. HANS ANTONI	KETUA BIDANG
8.	BAJA	1. MARGARENS EDO	1. SIGAR MASANAE	KETUA
		2. LATIF PUASA	2. JEFRI TAHE	WAKIL KETUA
		3. BENSELINA BALOHA	3. DJABIR MARUF	SEKRETARIS
		4. ALEXANDERMASANAE	4. YUSNI MARAS	KETUA BIDANG
		5. ASIS DADERE	5. YEFTA TALIWUNAN	KETUA BIDANG

9	JANGAILULU	1. GABRIEL MAKAHEMING 2. YEPSEN MANDARASI 3. IRWAN POLI 4. MAGELHANS MASANAE 5. DELCI DJUMATI	1. YORES FEREI 2. ADHOPNI MAHADUN 3. JUNVANBERT MASANAE 4. IWAN POLII 5. DELCI JUMATI	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
10	TUAKARA	1. NURDIN AMIN 2. IKRAM SADIK 3. MUIS MAYA 4. NURIATI DUDUAKA 5. FURKAN PASIMANYEKU	1. RUSLAN PASIMANYEKU 2. NURDIN AMIN 3. ABUBAKAR HAMISI 4. YUNI HAMISI 5. MUIS MAYA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	